



PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DALAM MENDORONG INOVASI SISTEM MANAJEMEN BISNIS UMKM

Ossa Sutaarga

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Banten, Indonesia
ossa.sutaarga@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima

Juli 2025

Revisi

Agustus 2025

Terbit

Agustus 2025

Keywords:

MSMEs, Local Government Role, Business Management System Innovation, MSME digitalization, Lebak Regency

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in regional economic development, including in Lebak Regency. However, most MSMEs still face limitations in implementing business management system innovations, particularly in the use of technology and integrated business management practices. This study aims to analyze the role of the Lebak Regency Government in promoting business management system innovation among MSMEs. This research employs a qualitative descriptive approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving local government officials and MSME actors. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model. The findings indicate that the Lebak Regency Government has acted as a facilitator, regulator, and mentor through training programs, digital assistance, and business legalization facilitation. Nevertheless, business management system innovation among MSMEs remains partial, not fully integrated, and unevenly distributed across regions. This study concludes that stronger policy strategies, sustainable assistance, and system integration are needed to enhance the effectiveness of business management system innovation for MSMEs in Lebak Regency.

Korespondensi:

ossa.sutaarga@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Lebak. Namun, sebagian besar UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam penerapan inovasi sistem manajemen bisnis, khususnya dalam pemanfaatan teknologi dan pengelolaan usaha yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan aparat pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak telah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan pendamping melalui program pelatihan, pendampingan digital, serta fasilitasi legalitas usaha. Namun, inovasi sistem manajemen bisnis UMKM masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh, serta belum merata antarwilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan strategi kebijakan, pendampingan berkelanjutan, dan integrasi sistem untuk meningkatkan efektivitas inovasi manajemen bisnis UMKM di Kabupaten Lebak.

©2025 Aurum Ratio: Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi Sistem

How to cite (in APA Style): Parmanto, C., & Fauzi, M. (2025) Peran Pemerintah Kabupaten Lebak Dalam Mendorong Inovasi Sistem Manajemen Bisnis UMKM. *Aurum Ratio: Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi Sistem*, 1(1), 103–112.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah karena perannya dalam menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Lebak, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan sebaran yang merata di seluruh kecamatan. Berdasarkan data resmi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak, jumlah UMKM yang tercatat mencapai 72.485 unit usaha, yang terdiri dari 26.600 usaha mikro dan 45.885 usaha kecil, tersebar di 28 kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak (Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lebak, 2024). Analisis sebaran UMKM menunjukkan adanya konsentrasi usaha yang tinggi di pusat-pusat aktivitas ekonomi. Kecamatan Rangkasbitung tercatat sebagai wilayah dengan jumlah UMKM terbesar, yakni 8.442 unit, diikuti oleh Malingping (6.238 unit) dan Ciligrang (4.267 unit). Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah UMKM relatif rendah antara lain Sajira (562 unit), Muncang (602 unit), dan Lebakgedong (644 unit). Pola ini mengindikasikan adanya kesenjangan pengembangan UMKM antarwilayah, yang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah daerah secara lebih terarah dan berbasis data (Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lebak, 2024).

Dari sisi jenis usaha, UMKM di Kabupaten Lebak didominasi oleh sektor kuliner, kriya, fashion, dan jasa, yang sebagian besar masih dijalankan dengan sistem manajemen bisnis sederhana dan berbasis konvensional. Data dinas menunjukkan bahwa sektor kuliner dan perdagangan mikro mendominasi struktur UMKM, sementara usaha berbasis digital dan jasa teknologi masih relatif terbatas proporsinya (Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lebak, 2024). Kondisi ini mencerminkan bahwa inovasi sistem manajemen bisnis, khususnya pemanfaatan teknologi digital, belum diadopsi secara optimal oleh mayoritas pelaku UMKM.

Lebih lanjut, data perizinan menunjukkan bahwa dari total UMKM yang ada, sebagian besar belum sepenuhnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini berdampak pada keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan, program bantuan pemerintah, serta integrasi ke dalam ekosistem bisnis formal. Rendahnya tingkat legalitas usaha tersebut menjadi indikator penting perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong transformasi sistem manajemen bisnis UMKM, tidak hanya dari aspek pemasaran, tetapi juga tata kelola, pencatatan usaha, dan digitalisasi administrasi (Dinas Koperasi UKM Kabupaten Lebak, 2024).

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM telah menjalankan berbagai program pembinaan, seperti pendataan UMKM berbasis kecamatan, fasilitasi penerbitan NIB, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan kapasitas manajemen usaha. Namun, melihat besarnya jumlah UMKM dan keragaman karakteristik wilayah, tantangan utama yang masih dihadapi adalah bagaimana inovasi sistem manajemen bisnis dapat diterapkan secara merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan, program, dan intervensi pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan riil pelaku UMKM berbasis data empiris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi, serta menjadi rujukan bagi penguatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal Kabupaten Lebak..

KAJIAN PUSTAKA

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, UMKM mendominasi struktur perekonomian dan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, terutama di daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang beragam. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan perubahan pola bisnis global, UMKM dihadapkan pada tantangan baru yang menuntut adanya adaptasi dan inovasi dalam sistem manajemen bisnisnya (Adiastita et al., 2023). Perkembangan era digital telah mengubah lanskap dunia usaha secara fundamental. Transformasi digital tidak lagi sekadar menjadi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi UMKM agar mampu bertahan dan bersaing. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat hubungan dengan konsumen melalui pemanfaatan teknologi informasi. Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi digital pada UMKM di Indonesia masih relatif rendah dan belum merata, terutama pada usaha mikro yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, modal, dan literasi digital (Fadli & Laksamana, 2025). Dalam literatur manajemen bisnis, transformasi digital UMKM dipahami sebagai proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek operasional usaha, mulai dari pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga pengambilan keputusan strategis. Amilia et al. (2024) menegaskan bahwa digitalisasi UMKM tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial atau platform e-commerce, tetapi juga mencakup perubahan pola pikir pelaku

usaha, restrukturisasi proses bisnis, serta penerapan sistem manajemen yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu, inovasi sistem manajemen bisnis menjadi elemen kunci dalam proses transformasi tersebut.

Inovasi sistem manajemen bisnis merujuk pada pembaruan atau pengembangan cara pengelolaan usaha melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang mendukung efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan usaha. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada UMKM terbukti mampu meningkatkan akurasi pencatatan keuangan, pengelolaan inventaris, serta analisis kinerja usaha, sehingga pelaku UMKM dapat mengambil keputusan bisnis secara lebih rasional dan berbasis data (Fadillah & Nasution, 2025). Inovasi ini menjadi sangat relevan bagi UMKM yang selama ini masih menjalankan usaha secara konvensional dan informal.

Sejumlah penelitian juga menekankan bahwa inovasi digital dalam operasional bisnis berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing UMKM. Inovasi operasional berbasis digital memungkinkan UMKM untuk merespons perubahan permintaan pasar secara lebih cepat, menekan biaya produksi, serta meningkatkan kualitas layanan kepada konsumen. Tarigan et al. (2025) menyatakan bahwa inovasi operasional yang didukung oleh teknologi digital berperan sebagai faktor penentu keberlanjutan usaha UMKM dalam jangka panjang.

Namun demikian, keberhasilan inovasi sistem manajemen bisnis pada UMKM tidak dapat dilepaskan dari dukungan lingkungan eksternal, khususnya peran pemerintah. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator dalam mendorong transformasi UMKM. Melalui kebijakan, program pelatihan, pendampingan, serta penyediaan infrastruktur digital, pemerintah daerah dapat menciptakan

ekosistem yang kondusif bagi UMKM untuk berinovasi dan berkembang (Novianty et al., 2024).

Dalam konteks digitalisasi UMKM, peran pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada penyusunan regulasi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas pelaku usaha. Program sosialisasi, pelatihan digital marketing, pendampingan penggunaan platform e-commerce, serta fasilitasi legalitas usaha merupakan bentuk konkret intervensi pemerintah dalam meningkatkan kapabilitas UMKM. Ilham dan Nurlukman (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah dalam pengembangan UMKM berbasis media sosial dan e-commerce mampu meningkatkan kinerja usaha dan memperluas jangkauan pasar pelaku UMKM.

Selain itu, pengembangan layanan publik berbasis digital untuk UMKM juga menjadi bagian penting dari inovasi sistem manajemen bisnis. Implementasi sistem informasi pelayanan UMKM berbasis web oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan administratif, transparansi, serta kemudahan akses bagi pelaku UMKM terhadap berbagai program bantuan dan pembinaan (Amalia & Triyanto, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa inovasi sistem tidak hanya terjadi di tingkat usaha, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang mendukung UMKM.

Literatur internasional juga menguatkan temuan bahwa dukungan kebijakan pemerintah merupakan faktor krusial dalam mempercepat transformasi digital UMKM. Haug et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan digital transformation pada usaha kecil dan menengah sangat dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan, insentif finansial, serta dukungan teknis dari pemerintah. Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya bersifat komplementer, tetapi menjadi elemen sentral dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa inovasi sistem manajemen bisnis UMKM merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan kebijakan publik. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjembatani keterbatasan internal UMKM dengan tuntutan eksternal dunia usaha yang semakin digital. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM menjadi relevan dan signifikan secara akademik maupun praktis, sebagai dasar perumusan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih adaptif dan berkelanjutan..

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam peran Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM sesuai dengan konteks kebijakan dan kondisi lapangan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan fokus pada instansi pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan UMKM, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, serta pelaku UMKM di beberapa kecamatan.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan dinas, data UMKM, serta literatur yang relevan. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam program pemberdayaan UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Lebak memiliki peran yang sangat signifikan dalam struktur perekonomian daerah. Jumlah UMKM yang mencapai lebih dari 70 ribu unit usaha tersebar di seluruh kecamatan dengan konsentrasi terbesar berada di wilayah perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi, seperti Kecamatan Rangkasbitung, Malingping, dan Ciligrang. Sebagian besar UMKM tersebut merupakan usaha mikro yang bergerak pada sektor kuliner, perdagangan, kriya, dan jasa. Karakteristik usaha yang berskala kecil dan berbasis rumah tangga menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM masih menjalankan usaha dengan sistem manajemen bisnis yang sederhana dan cenderung konvensional, terutama dalam pencatatan keuangan, pengelolaan usaha, dan strategi pemasaran.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak memainkan peran penting dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM. Hasil wawancara dengan aparatur pemerintah daerah menunjukkan bahwa peran pemerintah diwujudkan melalui fungsi fasilitasi, regulasi, dan pendampingan. Pemerintah daerah secara aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan kewirausahaan, sosialisasi digital marketing, serta pendampingan penggunaan platform digital untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong legalitas usaha melalui fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari upaya integrasi UMKM ke dalam sistem usaha formal dan berbasis digital.

Inovasi sistem manajemen bisnis yang didorong oleh pemerintah daerah umumnya berfokus pada aspek digitalisasi pemasaran dan perbaikan administrasi usaha. Pelaku UMKM mulai diperkenalkan pada pemanfaatan media sosial dan marketplace sebagai sarana promosi dan penjualan produk. Di sisi lain, pemerintah juga

mendorong pelaku usaha untuk melakukan pencatatan usaha yang lebih tertib, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi sistem yang diterapkan oleh sebagian besar UMKM masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh ke dalam manajemen bisnis, terutama pada aspek keuangan dan pengelolaan inventaris.

Respons pelaku UMKM terhadap program pemerintah pada umumnya bersifat positif. Pelaku UMKM mengakui bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan pemerintah membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap pengelolaan usaha dan membuka peluang akses pasar yang lebih luas. Namun, di sisi lain, pelaku UMKM juga mengungkapkan adanya berbagai kendala dalam mengimplementasikan inovasi sistem manajemen bisnis secara berkelanjutan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia dan modal, serta minimnya pendampingan lanjutan setelah pelatihan.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa efektivitas peran pemerintah daerah dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM masih dihadapkan pada tantangan struktural, seperti belum meratanya pelaksanaan program antar kecamatan dan belum optimalnya integrasi antarinstansi pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan dampak inovasi sistem yang dirasakan oleh UMKM masih belum merata dan belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya saing usaha secara signifikan. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak telah menunjukkan komitmen dan peran aktif dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM, namun masih diperlukan penguatan strategi, konsistensi pendampingan, dan integrasi kebijakan agar inovasi sistem yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja UMKM.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal jika dilihat dari skala UMKM dan kompleksitas tantangan yang dihadapi. Data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak mencatat jumlah UMKM mencapai 72.485 unit usaha, yang terdiri dari 26.600 usaha mikro dan 45.885 usaha kecil, dengan sebaran di 28 kecamatan. Jumlah yang besar ini menunjukkan potensi ekonomi lokal yang sangat signifikan, sekaligus menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan mendorong inovasi sistem manajemen bisnis secara merata.

Temuan penelitian menguatkan pandangan dalam literatur bahwa UMKM, khususnya usaha mikro, umumnya masih menjalankan manajemen bisnis secara sederhana dan konvensional. Dominasi sektor kuliner, perdagangan kecil, kriya, dan jasa di Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih berorientasi pada usaha berbasis rumah tangga dengan keterbatasan dalam pencatatan keuangan, pengelolaan inventaris, dan perencanaan bisnis. Kondisi ini sejalan dengan temuan Adiastita et al. (2023) dan Fadli dan Laksamana (2025) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya dan literasi digital menjadi faktor utama lambatnya transformasi sistem manajemen bisnis UMKM di Indonesia.

Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan pendamping sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini selaras dengan konsep peran pemerintah dalam pengembangan UMKM yang dikemukakan oleh Novianty et al. (2024). Pemerintah Kabupaten Lebak telah berupaya mendorong inovasi sistem melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan digital marketing, serta fasilitasi

legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam membangun kapasitas UMKM agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Namun demikian, pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi sistem manajemen bisnis yang didorong pemerintah masih cenderung berfokus pada aspek digitalisasi pemasaran, sementara aspek manajemen internal usaha belum mendapatkan perhatian yang sama kuat. Padahal, kajian Fadillah dan Nasution (2025) menegaskan bahwa inovasi sistem manajemen yang terintegrasi—meliputi pencatatan keuangan, pengelolaan stok, dan analisis usaha—merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kinerja dan keberlanjutan UMKM. Fakta bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Lebak masih belum menerapkan sistem pencatatan usaha yang tertib menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan implementasi di tingkat pelaku usaha.

Dari perspektif spasial, data dinas menunjukkan adanya ketimpangan distribusi UMKM antar kecamatan. Kecamatan Rangkasbitung mencatat jumlah UMKM tertinggi dengan 8.442 unit, diikuti Malingping (6.238 unit) dan Ciligrang (4.267 unit), sementara kecamatan seperti Sajira, Muncang, dan Lebakgedong memiliki jumlah UMKM di bawah 700 unit.

Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa akses terhadap program pembinaan dan inovasi sistem manajemen bisnis kemungkinan juga tidak merata. Hal ini memperkuat argumen bahwa kebijakan pemberdayaan UMKM perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kapasitas lokal, bukan hanya diterapkan secara seragam.

Respons positif pelaku UMKM terhadap program pemerintah menunjukkan bahwa

intervensi pemerintah memiliki relevansi dan manfaat nyata. Namun, kendala yang diungkapkan pelaku UMKM—seperti keterbatasan literasi digital, waktu, dan pendampingan lanjutan—menunjukkan bahwa inovasi sistem manajemen bisnis tidak dapat dicapai hanya melalui pelatihan jangka pendek. Haug et al. (2023) menegaskan bahwa transformasi digital UMKM membutuhkan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, konsistensi pendampingan, serta integrasi lintas sektor agar dampaknya dapat dirasakan secara signifikan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM sudah berada pada arah yang tepat, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Inovasi sistem yang lebih komprehensif perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pemasaran digital, tetapi juga pada penguatan manajemen internal usaha dan integrasi sistem layanan pemerintah. Temuan ini memperkuat literatur yang menyatakan bahwa keberhasilan inovasi sistem manajemen bisnis UMKM sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, kapasitas pelaku usaha, dan dukungan ekosistem bisnis lokal..

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki peran yang penting dalam mendorong inovasi sistem manajemen bisnis UMKM, terutama melalui fungsi fasilitasi, regulasi, dan pendampingan. Berbagai program pelatihan, pendampingan digital, serta fasilitasi legalitas usaha menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi UMKM menuju sistem manajemen bisnis yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi sistem manajemen bisnis UMKM di Kabupaten Lebak belum berjalan secara optimal dan merata. Inovasi yang diterapkan oleh sebagian besar UMKM masih bersifat parsial dan lebih terfokus pada digitalisasi pemasaran, sementara aspek manajemen internal usaha seperti pencatatan keuangan, pengelolaan inventaris, dan perencanaan bisnis belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, terdapat ketimpangan antarwilayah dalam akses terhadap program pembinaan dan inovasi sistem, yang menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih berbasis wilayah dan kebutuhan riil UMKM.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah daerah telah berada pada arah yang tepat, tetapi masih memerlukan penguatan strategi, konsistensi pendampingan, serta integrasi kebijakan lintas sektor agar inovasi sistem manajemen bisnis UMKM dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan daya saing UMKM di Kabupaten Lebak.

Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, disarankan untuk memperkuat integrasi inovasi sistem manajemen bisnis UMKM dengan tidak hanya menekankan pada pemasaran digital, tetapi juga pada penguatan manajemen internal usaha, seperti pencatatan keuangan digital, pengelolaan stok, dan perencanaan usaha. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan keberlanjutan pendampingan serta memperluas jangkauan program pembinaan ke seluruh kecamatan secara lebih merata.
2. Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk meningkatkan kesiapan dan komitmen dalam mengadopsi inovasi sistem manajemen bisnis, khususnya dalam

memanfaatkan teknologi digital secara berkelanjutan. Pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mengikuti pelatihan, tetapi juga mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan usaha sehari-hari.

3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) guna mengukur secara lebih objektif pengaruh peran pemerintah terhadap kinerja dan daya saing UMKM. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan wilayah atau membandingkan antar daerah untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasta, R., Pratama, A. R., & Nugroho, Y. (2023). Digital transformation and business management innovation in micro and small enterprises. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 30(4), 512–528.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. (2023). *Profil dan data UMKM Kabupaten Lebak tahun 2023*. Pemerintah Kabupaten Lebak.
- Fadillah, A., & Nasution, R. S. (2025). Innovation in business management systems and MSME performance in developing regions. *International Journal of Innovation Management*, 29(1), 1–18.
- Fadli, M., & Laksamana, T. (2024). Government intervention and MSME digital readiness in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 26(2), 145–158.
- Haug, A., Nielsen, A. P., & Edwards, K. (2023). Digital transformation of SMEs: Barriers and enabling factors. *Journal of Business Research*, 156, 113482.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data UMKM nasional*. KemenKopUKM RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Novianty, R., Suryanto, T., & Wibowo, A. (2024). The role of local government in strengthening MSME competitiveness. *Journal of Public Administration and Governance*, 14(1), 89–104.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing.
- Porter, M. E. (1998). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Rahayu, R., & Day, J. (2017). E-commerce adoption by SMEs in developing countries. *Journal of Enterprise Information Management*, 30(3), 430–450.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tambunan, T. (2021). UMKM di Indonesia: Perkembangan, tantangan, dan kebijakan. Ghalia Indonesia.

World Bank. (2022). MSME digitalization and inclusive growth. World Bank Publications.

